

'RAMPAS' ASET PEMKOT, TAK BERKONTRIBUSI TERHADAP PAD

Komisi A Geram, Mayoritas Reklame di Kota Yogya Ilegal

YOGYA (KR) - Komisi A DPRD Kota Yogya dibuat geram setelah mendapat informasi jika mayoritas reklame yang berdiri di Kota Yogya bersifat ilegal atau tidak mengantongi izin. Tak hanya ilegal, bangunan reklame itu bahkan dinilai merampas aset Pemkot Yogya lantaran berdiri di tanah negara namun tidak membayar retribusi sewa aset.

Untuk menelusuri keberadaan reklame ilegal tersebut jajaran Komisi A DPRD Kota Yogya kembali melakukan inspeksi mendadak (sidak) pada Senin (30/12). Lokasi pertama di kawasan Kleringan yang banyak terdapat titik reklame berukuran besar. Lokasi itu menjadi serbuan reklame lantaran wilayahnya yang strategis dilalui warga yang hendak menuju Malioboro dari sisi utara. Sedangkan lokasi kedua di kawasan simpang Gondomanan yang juga tidak kalah strategis. "Di setiap titik itu kami temukan bangunan reklame yang tidak berizin. Bahkan teknis pemasangan juga melanggar peraturan," tandas Ketua Komisi A DPRD Kota Yogya Susanto

Dwi Antoro, di sela sidak.

Sidak tersebut diikuti hampir seluruh anggota Komisi A DPRD Kota Yogya serta melibatkan unsur Sat Pol PP serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogya. Akhir pekan lalu jajaran Komisi A juga melakukan sidak namun sasarannya ialah bangunan hotel tak berizin. Kedua agenda sidak itu pun memiliki semangat sama dalam mengawal penegakan aturan. Khusus mengenai reklame, diatur melalui Perda 6 Tahun 2022 tentang Reklame.

Susanto Dwi Antoro yang akrab disapa Toro, mengaku, dalam rapat koordinasi bersama tim eksekutif disebutkan jika dari total reklame

yang berdiri saat ini, hanya kurang dari 50 persen yang mengantongi perizinan. Sesuai perda, izin harus dipenuhi oleh penyelenggara reklame ada dua jenis yakni Izin Penyelenggaraan Reklame (IPR) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). "Berarti kan jumlah yang beredar mayoritas tidak berizin. Ini tidak bisa dibiarkan, dan kami tidak akan pandang bulu. Semua harus tertib. Bukan semata menyangkut estetika tetapi taat aturan supaya semua sesuai dengan tata kota," urainya.

Di samping itu, sebagian besar reklame juga berdiri di atas aset milik pemerintah. Di antaranya di taman, sisi terluar trotoar, tanah negara an-

tara sisi terluar trotoar dan persil, halte bus, pasar, terminal, tempat khusus parkir dan lainnya. Lagi-lagi, reklame yang berdiri di atas aset Pemkot itu pun sama sekali juga tidak mengantongi izin. Dengan begitu keberadaannya tidak berkontribusi sama sekali terhadap pendapatan asli daerah (PAD), baik retribusi penyewaan aset maupun pajak reklame. "Kami sudah membuat hitungan, miliaran rupiah potensi PAD itu hilang. Misal di kawasan sumbu filosofis itu saja ada Rp 8 miliar, belum lagi yang tidak menyewa aset padahal jelas-jelas merampas aset Pemkot. Berarti ada double kerugian yang dialami Pemkot yakni dari penyewaan aset dan pajak," tegas Toro.

Oleh karena itu, usai melakukan sidak jajarannya akan melakukan daftar inventaris masalah (DIM) sebagai dasar penerbitan rekomendasi. Sebagai bocoran, rekomendasi



KR-Ardhi Wahdan

Jajaran Komisi A DPRD Kota Yogya bersama tim eksekutif melakukan sidak reklame tak berizin.

itu akan secara tegas meminta eksekutif terutama Tim Sadewa yang terdiri dari berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) untuk mendata eksisting reklame tidak berizin. Selanjutnya mende- sak Sat Pol PP Kota Yogya agar melakukan penertiban tanpa pandang bulu.

Dikonfirmasi terkait hal tersebut, Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Sat Pol PP

Kota Yogya Dodi Kurnianto, membenarkan banyak reklame yang berdiri namun tidak mengantongi izin. Pihaknya selama ini juga tidak pernah berhenti melakukan tahapan penertiban.

"Tahapannya dari peringat- an tertulis sampai pembongkaran paksa. Sudah beberapa lokasi terpaksa kami bongkar, dan penertiban reklame ini juga jalan terus," terangnya.

Dodi mengaku sebagian pengelola reklame tidak mengantongi izin karena persoalan alas hak. Terutama berkaitan pemilik persil yang menjadi lokasi titik pendirian reklame. Namun ada juga karena sebab lain seperti berada di kawasan yang tidak semestinya diperuntukkan reklame komersial sehingga tidak mungkin mendapatkan izin.

Terkait rencana rekomendasi yang akan dilayangkan oleh Komisi A, menurut Dodi, jajarannya justru sangat menantikan. Pasalnya upaya penertiban reklame melanggar yang sudah dilakukan selama ini dipastikan akan lebih kuat seiring adanya dukungan tertulis dari kalangan legislatif. "Kami justru merasa senang jika ada rekomendasi itu. Jadi nanti ada pijakan yang lebih memperkuat aksi kami dalam menertibkan reklame melanggar," tandasnya. (Dhi)-d

WEBINAR SERIES 10 TAHUN JKN

Membangun Masa Depan Kesehatan Indonesia

YOGYA (KR) - Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan, Universitas Gadjah Mada (PKMK FK-KMK UGM) sukses menyelenggarakan webinar series '10 Tahun Kebijakan JKN dalam 3 Periode'. Rangkaian webinar yang menghadirkan pakar kebijakan, peneliti, dan praktisi kesehatan ini mengupas tuntas perjalanan satu dekade implementasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Indonesia.

Ahli kebijakan kesehatan dan reformasi sistem FK-KMK UGM, Prof dr Laksono Trisnantoro MSc PhD menuturkan webinar series ini didesain dengan tiga tujuan strategis utama. Pertama, memberikan pemahaman mendalam tentang dinamika implementasi JKN selama tiga periode berbeda. Kedua, menganalisis kebijakan pendanaan dari perspektif Reformasi Sektor Kesehatan. Ketiga, melakukan analisis kebijakan untuk menjamin keberlanjutan program JKN di masa mendatang.

"Evaluasi komprehensif ini sangat krusial untuk merumuskan strategi penguatan JKN dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029," jelas Prof Laksono usai webinar, Senin (30/12). Hasil diskusi dan analisis dari webinar series ini akan menjadi masukan berharga bagi pengambil kebijakan dalam merancang perbaikan sistem JKN ke depan.

Menurut Prof Laksono, selama satu dekade,

JKN terbagi dalam tiga fase utama, yaitu masa implementasi awal, periode pandemi Covid-19, dan periode pasca-pandemi. Keberhasilan JKN mencapai Universal Health Coverage (UHC) untuk lebih dari 260 juta penduduk mendapat apresiasi internasional. Pencapaian ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah Indonesia dalam mewujudkan sistem jaminan kesehatan yang inklusif dan berkelanjutan. "Meski demikian, berbagai tantangan dalam implementasi masih memerlukan perhatian khusus dari seluruh pemangku kepentingan," ujarnya.

Lebih lanjut dikatakan Prof Laksono, berdasarkan hasil diskusi dan analisis mendalam selama webinar series, diperlukan kebijakan baru yang lebih terstruktur untuk mengatasi kelemahan hukum dan landasan sistematis pada undang-undang kesehatan sebelumnya.

Rekomendasinya antara lain, sistem pengalangan dana perlu dianalisis berbasis pengalaman empirik 10 tahun dan perlu berbasis segment anggota BPJS (PBI dan non PBI). Perilaku masyarakat dalam berobat dan siapa mereka di setiap segmen perlu diteliti. "Sebagai catatan, analisis berbasis segment ini belum pernah dilakukan di Indonesia," katanya.

Kemudian, pengalangan dana kesehatan perlu memanfaatkan potensi pendanaan swasta karena kemampuan pemerintah mendanai terbatas, kecuali apabila sistem perpajakan di Indonesia dapat berubah sehingga Tax Ratio meningkat tinggi. (Dev)-d

PEMUTAKHIRAN DATA TLHP

Wujud Transparansi dan Akuntabilitas

YOGYA (KR) - Pemutakhiran data hasil pemeriksaan semester II tahun 2024 dan pending tahun sebelumnya merupakan langkah penting untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan dan program yang telah dilaksanakan berjalan secara efisien dan efektif. Hal itu memperkuat komitmen bersama pada prinsip transparansi dan akuntabilitas. Untuk itu Wakil Gubernur (Wagub) DIY mengajak semua pihak untuk memperkuat kerja sama antar instansi guna memastikan pemutakhiran data berjalan dengan lancar dan tepat waktu.

"Terima kasih kepada Inspektorat dan OPD yang menjadi objek pemeriksaan di lingkungan Pemda DIY atas kerja sama yang baik. Sehingga proses pemeriksaan dapat terlaksana dengan lancar. Selanjutnya, penyelesaian atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan tahun 2024

dapat dipercepat sehingga tidak terjadi lagi temuan berulang," kata Wakil Gubernur DIY, Sri Paku Alam X dalam Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP) Semester II Tahun 2024 di Kantor Inspektorat DIY, Senin (30/12).

Wagub DIY juga melakukan launching eMobil Simpatiki sebagai bentuk layanan untuk pengaduan atas penyalahgunaan wewenang, KKN, benturan kepentingan, pungutan liar dan pelanggaran lainnya. Program Mobil Simpatiki (Operasional Kampanye Antikorupsi) tersebut merupakan inovasi kolaborasi edukasi antikorupsi untuk memperluas jangkauan sosialisasi, pencegahan, dan pemberantasan korupsi di DIY.

Paku Alam X berharap, melalui pemutakhiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan semester II Tahun 2024 dan pending

tahun sebelumnya dapat diketahui kendala dan segera ditemukan solusinya. Koordinasi yang baik sangat penting dalam menyatukan data yang saling terintegrasi. Dengan begitu hasil yang diperoleh dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai kondisi pembangunan daerah.

Sementara itu, Inspektur DIY Muhammad Setiadi menyampaikan, maksud dari pelaksanaan pemutakhiran data TLHP adalah untuk menginformasikan pengawasan. Juga tindak lanjut hasil pengawasan APIP Tahun 2024 serta pending tahun sebelumnya kepada OPD di lingkungan Pemda DIY dan Kabupaten/Kota se-DIY. Dengan begitu pihak-pihak terkait dapat mengetahui gambaran kondisi beserta titik-titik rawan yang berpotensi menghambat terwujudnya good governance dan clean government. (Ria)-d

BRI SALURKAN KUR SENILAI RP 175,66 TRILIUN Bukti Nyata Implementasi Asta Cita dalam Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan



KR - Istimewa

Direktur Bisnis Mikro BRI, Supari

JAKARTA (KR) - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) mencatat penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp175,66 triliun kepada 3,7 juta debitur UMKM hingga akhir November 2024. Pencapaian ini menunjukkan komitmen BRI sebagai bank yang mengimplementasikan Asta Cita dalam mendukung pemberdayaan UMKM di seluruh Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Direktur Bisnis Mikro BRI Supari mengungkapkan bahwa pencapaian ini merupakan bagian dari upaya BRI untuk memperluas akses permodalan bagi pelaku UMKM, terutama di sektor-sektor produktif seperti pertanian, perdagangan, dan perikanan. "Melalui KUR, kami tidak hanya menyediakan pembiayaan, tetapi juga memberdayakan UMKM agar mampu

tumbuh lebih berkelanjutan," ujarnya.

BRI mencatat penyaluran KUR tersebar merata di berbagai wilayah Indonesia dengan fokus pada pemberdayaan sektor produksi. "Sektor Pertanian menjadi penyumbang terbesar diantara sektor lainnya yaitu senilai Rp.69,60 triliun atau mengambil porsi 39,62%," imbuh Supari.

Sebelumnya Supari mengusulkan skema penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di tahun depan dibagi menjadi dua, yakni mendorong inklusivitas dan graduasi pelaku UMKM. Skema berbeda penting untuk dijalankan mengingat adanya perbedaan kualifikasi penerima kredit bersubsidi dari pemerintah.

"KUR harus mulai berbeda skemanya. Menurut saya ada dua skema, yakni dalam rangka inklusi dan dalam rangka meny-

apkan graduasi atau pregraduasi," jelas Supari dalam diskusi bertajuk Menuju Satu Dekade KUR untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional melalui Pembiayaan Usaha Produktif.

Merujuk pada data kajian yang dilakukan BRI dan BRIN, KUR menaikkan rata-rata pendapatan debitur sebesar 32%-50%. Kemudian KUR juga mampu meningkatkan keuntungan sekitar 34%-38%.

Debitur KUR juga menghadapi peningkatan pengeluaran melalui angsuran KUR dan biaya teknis lainnya. Namun demikian, keterampilan teknis dapat mendorong efisiensi biaya. Di samping itu, pelaku usaha yang mendapatkan KUR cenderung memiliki tenaga kerja 28% lebih banyak ketimbang non debitur KUR. (*)



KR - Istimewa

BRI Salurkan KUR Senilai Rp175,66 triliun, Bukti Nyata Implementasi Asta Cita dalam Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan



KR - Istimewa

BRI catat penyaluran KUR sebesar Rp175,66 triliun kepada 3,7 juta debitur UMKM hingga akhir November 2024.



PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996, PT Bank BPD DIY melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta akan melaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan, yang dilaksanakan dengan jenis penawaran lelang melalui internet pada aplikasi lelang (open bidding) terhadap jaminan milik debitur/ penjamin hutang atas nama:

CV ISHANA KOKKA, berupa:

- Sebidang tanah pekarangan berikut bangunan dan segala sesuatu yang berdiri/tertanam di atasnya, terletak di Desa Wonosari, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana tertuang dalam SHM No. 03549 Desa/Kel. Wonosari dengan luas tanah 289 m² atas nama Devi Anggaeni Prawidiyanti.
Nilai Limit : Rp 700.000.000,-
Uang Jaminan Penawaran Lelang : Rp 140.000.000,-
- Sebidang tanah pekarangan berikut bangunan dan segala sesuatu yang berdiri/tertanam di atasnya, terletak di Desa Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana tertuang dalam SHGB No. 01660 Desa/Kel. Bangunjiwo dengan luas tanah 112 m² atas nama Nyonya Devi Anggaeni Prawidiyanti.
Nilai Limit : Rp 1.000.000.000,-
Uang Jaminan Penawaran Lelang : Rp 200.000.000,-

Pelaksanaan Lelang:

- | | |
|-----------------------|---|
| Hari | : Selasa |
| Tanggal | : 14 Januari 2025 |
| Waktu Penawaran | : Sejak ditayangkan pada aplikasi lelang s.d batas akhir penawaran |
| Batas Akhir Penawaran | : 14 Januari 2025, Pukul 11.00 Waktu Server aplikasi lelang melalui internet sesuai WIB |
| Alamat Domain | : lelang.go.id atau portal.lelang.go.id |
| Tempat lelang | : KPKNL Yogyakarta, Jalan Kusumanegara No. 11 Yogyakarta |
| Penetapan pemenang | : Setelah batas akhir penawaran |

Peserta lelang diharap menyesuaikan diri dengan penggunaan waktu server yang tertera pada alamat domain diatas.

Syarat dan Ketentuan Lelang :

- Calon peserta lelang dapat melihat objek lelang di masing-masing lokasi sejak diumumkan
- Lelang dilaksanakan dengan penawaran melalui aplikasi lelang internet yang di akses pada alamat domain: lelang.go.id atau portal.lelang.go.id
- Calon peserta lelang mendaftarkan diri pada Aplikasi Lelang Internet alamat domain angka 2 di atas, kemudian mengaktifkan akun dan merekam (scan) KTP, NPWP (ekstensi file *.jpg, *.png), dan nomor rekening atas nama sendiri. Peserta yang bertindak sebagai kuasa badan usaha diwajibkan mengunggah surat kuasa notariil, akta pendirian perusahaan dan perubahannya, NPWP perusahaan dalam satu file.
- Jaminan Penawaran Lelang :
 - Peserta Lelang diwajibkan menyetero uang jaminan sesuai dengan pengumuman lelang disetero sekaligus (bukan cicil) dan harus sudah efektif paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang
 - Uang jaminan lelang disetorkan ke nomor Virtual Account (VA) peserta lelang, yang akan dikirimkan secara otomatis dari alamat domain di atas kepada akun peserta lelang.
- Penawaran lelang dimulai dari nilai limit dan dapat diajukan berkali-kali sampai batas waktu sebagaimana tersebut diatas.
- Peserta lelang yang ditunjuk sebagai pemenang wajib melunasi pembayaran harga pokok lelang ditambah biaya lelang sebesar 2% paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah lelang, jika tidak maka pada hari kerja berikutnya pemenang dinyatakan wanprestasi, uang jaminan akan disetorkan seluruhnya ke Kas Negara.
- Pemenang lelang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai ketentuan berlaku, yang wajib disetorkan ke rekening penampungan PT Bank BPD DIY paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang.
- Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) mengacu pada UU No.1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah dimana objek lelang berada.
- Objek dilelang dalam kondisi apa adanya dengan segala konsekuensi biaya tertanggung atas objek lelang. Peserta lelang dianggap telah mengetahui kondisi objek lelang. Peserta lelang tidak dapat menuntut ganti rugi apabila lelang dibatalkan karena sesuatu hal sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- Informasi lebih lanjut dapat menghubungi PT Bank BPD DIY, Jalan Tentara Pelajar No. 7 Telepon : 0274-561614 (ext 237) dan KPKNL Yogyakarta, Jl. Kusumanegara No. 11 Yogyakarta Telepon : 0274-544091



Yogyakarta, 31 Desember 2024
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Ttd.
Pemimpin Desk Risiko Kredit
Dan Penyelesaian Kredit Bermasalah

